

Beranda > Opini >

Menakar Kembali Makna Efektif Dan Efisiensi Dalam Organisasi



Warta Kita
Mei 22, 2024



WartaKita.org
Setia Mengabarkan Kebajikan



(doc. raja rak)

BERITA mengenai rencana pemerintahan baru dalam era kepemimpinan Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian menjadi 40 kementerian menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat.

Langkah ini sejalan dengan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang tengah dibahas oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR.

Salah satu poin revisi tersebut adalah penghapusan batas jumlah kementerian yang saat ini dibatasi sebanyak 34 kementerian.

Namun, muncul pertanyaan kritis: apakah penambahan jumlah kementerian ini akan benar-benar efektif dan efisien, atau hanya akan membebani anggaran negara?

Efektivitas Penambahan Kementerian



Efektivitas suatu organisasi, termasuk pemerintahan, sering kali diukur dari sejauh mana tujuan dan sasaran strategisnya tercapai. Dalam konteks penambahan jumlah kementerian, pertanyaannya adalah apakah penambahan ini akan membantu pemerintahan dalam mencapai target-target nasional dengan lebih baik. Salah satu argumen yang mendukung penambahan kementerian adalah bahwa tugas-tugas pemerintahan yang semakin kompleks membutuhkan organisasi yang lebih tersegmentasi dan spesifik.

Namun, penambahan kementerian tidak selalu menjamin peningkatan kinerja. Pemerintahan yang terlalu banyak kementeriannya bisa menghadapi tantangan koordinasi yang lebih besar, yang justru dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. Selain itu, terlalu banyak kementerian bisa menciptakan birokrasi yang lebih besar, yang berpotensi menghambat efektivitas pelayanan publik.

Terlebih lagi, masyarakat baik secara pribadi maupun melalui kelompoknya yang kontra dengan hal tersebut menganggap bahwa penambahan jumlah kementerian hanyalah sarana yang digunakan oleh pemerintahan yang baru dalam bagi-bagi kekuasaan sebagai imbal balik atau balas budi karena telah didukung dalam Pemilu 2024.

Efisiensi Dan Anggaran

Dari perspektif efisiensi, penambahan jumlah kementerian secara otomatis berimplikasi pada peningkatan anggaran, yang mencakup aspek operasional dan administrasi. Setiap kementerian baru membutuhkan alokasi dana yang signifikan untuk berbagai kebutuhan.

Pertama, diperlukan anggaran untuk membayar gaji pegawai negeri sipil yang akan dipekerjakan di kementerian tersebut. Semakin banyak pegawai yang direkrut, semakin besar pula dana yang harus dialokasikan untuk gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya.

Kedua, setiap kementerian memerlukan fasilitas kantor yang representatif, yang meliputi bangunan, peralatan kantor, infrastruktur teknologi, dan lain-lain. Pembangunan atau penyewaan fasilitas ini tentu membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Selain itu, operasional sehari-hari seperti listrik, air, internet, dan biaya pemeliharaan juga menambah beban anggaran negara.

Ketiga, berbagai kegiatan operasional seperti rapat, pelatihan, perjalanan dinas, dan program-program kementerian juga memerlukan anggaran yang *signifikan*. Dalam situasi ekonomi yang menantang, di mana pendapatan negara mungkin tidak optimal, maka peningkatan anggaran untuk mendukung kementerian-kementerian baru ini bisa menjadi beban berat bagi keuangan negara. Sumber daya yang seharusnya bisa dialokasikan untuk program-program prioritas lainnya mungkin harus dialihkan untuk menutupi kebutuhan operasional kementerian baru.

Selain aspek anggaran, penting untuk menyoroti bahwa efektivitas suatu kementerian tidak ditentukan semata-mata oleh jumlahnya, melainkan oleh seberapa baik sumber daya yang ada dikelola dan dimanfaatkan. Penambahan kementerian tanpa peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia serta tanpa adanya sistem kerja yang efektif hanya akan menghasilkan organisasi yang besar namun lamban.

Urgensi Penambahan Kementerian



Pertanyaan mendasar lainnya adalah mengenai urgensi penambahan kementerian. Apakah ada kebutuhan nyata dan mendesak yang tidak dapat ditangani oleh kementerian yang sudah ada? Ataukah penambahan ini lebih bersifat politis, sebagai upaya untuk memberikan tempat kepada berbagai kelompok kepentingan?

Jika memang ada kebutuhan yang mendesak dan *spesifik*, seperti penanganan masalah lingkungan hidup, teknologi digital, atau perubahan iklim, maka penambahan kementerian bisa dipertimbangkan. Namun, harus ada kajian mendalam dan bukti kuat bahwa penambahan kementerian tersebut benar-benar diperlukan dan tidak bisa diatasi dengan penguatan struktur dan fungsi kementerian yang sudah ada.

Pada akhirnya, menurut penulis, penambahan jumlah kementerian oleh pemerintahan baru perlu dikaji secara kritis dengan mempertimbangkan prinsip efektif dan efisien. Peningkatan jumlah kementerian tanpa perencanaan yang matang berisiko menciptakan birokrasi yang lebih besar dan pemborosan anggaran.

Hal mendasar yang perlu dikaji adalah untuk memastikan bahwa setiap penambahan kementerian didasarkan pada kebutuhan nyata dan didukung oleh strategi yang jelas untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Tujuan utama adalah menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel, bukan sekadar memperbesar struktur organisasi.



Januari Ayu Fridayani

Dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

